



TEKS DAN KONTEKS DISKURSUS PERLAWANAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Atiq M Romdlon, Murni Fidiyanti¹, Abdur Rohman², Zudan Rosyidi³

UIN Sunan Ampel Surabaya

murnifidiyanti@uinsa.ac.id, abdurrohman@uinsa.ac.id, zudanrosyidi@uinsa.ac.id

ABSTRACT

This research discusses about how the form of FPI's resistance toward the government through text and context that produced. This research used qualitative research by critical discourse analysis approach. Aspects of this approach are microstructural, mesostructural and macrostructural. There are some results of this research. First is microstruktural aspect. It is found that diction that used are eufimistic that have satirize meaning. Besides, formal diction also used in the case of law, economic and culture. Second is the dimension that relates the process of producing and consuming the text (mesostructural). In this dimension, the texts are produced by the speakers who are ex-official of Islamic Defender Front. They are Habib Rizieq Shihab, Munarman, Novel Bamukmin and, Aziz Yanuar. Background knowledge of the writers gave impact to the texts that are produced. Third is the dimension that relates the context outside the text (macrostructural). This dimension analyzes the text based on situational, institutional and social based on outside the text that give effect of the producing of text.

Keywords: Text; Context; Discourse; FPI; Government

PENDAHULUAN

Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi Islam yang didirikan oleh beberapa tokoh agama, ulama serta aktifis muslim pada tanggal 17 Agustus 1998, di Ciputat, Jakarta Selatan tepatnya di pesantren Alum Kampung Utan. Organisasi ini dipelopori oleh tokoh Islam yang bernama Habib Rizieq Shihab. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi FPI. Pertama, adalah adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa terhadap umat Islam Indonesia. Kedua, aparat negara yang dinilai gagal dalam menegakkan hukum. Ketiga, adalah amar makruf dan nahi munkar harus ditegakkan oleh setiap umat muslim. Keempat yaitu setiap muslim wajib

menjaga harkat dan martabat Islam. Selain keempat faktor tersebut, Reformasi 1998 secara tidak langsung turut berperan atas kehadiran FPI karena membuka ruang partisipasi sosial politik bagi masyarakat muslim secara lebih luas (Al-Zastrouw, 2006:90).

Tidak butuh waktu lama untuk mengembangkan organisasi ini di beberapa kota besar di Indonesia. Organisasi yang bertujuan memerangi kemaksiatan yang bertentangan dengan hukum Islam mendapatkan respon luas dari masyarakat. Terlebih lagi nama organisasi ini yang berusaha untuk membela ajaran dan nilai Islam tidak untuk kelompok maupun perseorangan melainkan untuk umum (Jamhari, 2004:130-132).



Dalam perjalanannya, organisasi ini identik dengan aksi *sweeping* terhadap aktivitas masyarakat yang dianggap melanggar syariat Islam yang sering dilakukan bulan Romadhon. Seringkali aksi ini disertai dengan tindakan kekerasan, misalnya tuntutan mereka untuk membubarkan kelompok Ahmadiyah yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam, peristiwa Monas, perusakan kantor Kemendagri atas Perda anti miras dan masih banyak peristiwa kekerasan lain (Anwar, 2014).

Aksi yang dilakukan oleh FPI adalah reaksi atas lambatnya pemerintah dalam menangani masalah sosial di masyarakat. Pada titik ini dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh FPI merupakan bentuk "perlawanan" atas diamnya pemerintah. Untuk menyebarkan gagasan perlawanan tersebut FPI menggunakan media sebagai salah satu alatnya (Woodward, 2014; Zinira, 2015), . Elit-elit FPI mengemas satu masalah sosial menjadi sebuah diskusi melalui media publik. Pada perkembangannya isu yang diusung tidak lagi terkait dengan masalah sosial yang gagal diselesaikan oleh pemerintah yang berkuasa pasca Pemilu 2014, tetapi FPI melalui sejumlah diskusi berposisi secara langsung pemerintah.

Ketika Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang dianggap sebagai representasi dari pemerintah yang berkuasa mencalonkan sebagai gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di tahun 2017, FPI melakukan perlawanan. Kelompok ini membuat sejumlah wacana ancaman asing atau non Islam terhadap masyarakat muslim. Terdapat banyak wacana yang beredar di masyarakat menjelang Pilkada tersebut. Wacana tersebut di antaranya terkait dengan ancaman pada agama Islam dengan hadirnya ideologi

komunis, masuknya etnis Tionghoa pada kancah politik nasional yang dengan mudah diterima masyarakat, dan ketiga adalah adanya gerakan dari kelompok non muslim untuk mengambil alih pucuk kepemimpinan di Indonesia dengan memasukkan muslim abangan pada barisan presiden. Selain ditujukan pada kelompok-kelompok yang merorong Islam, wacana-wacana tersebut dapat diartikan sebagai bentuk perjuangan untuk melawan liberalisme yang dipraktikkan oleh oknum-oknum tertentu yang dianggap melekat pada pemerintah (Facal, 2019; Herawati, 2020).

Pada 30 Desember 2020, FPI dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun demikian organisasi ini tidak dapat dianggap mati atau berhenti. Para mantan petinggi FPI terus melakukan perlawanan untuk mencapai tujuannya. Perlawanan tersebut dilakukan dengan cara menyuarakan aspirasinya melalui pemproduksi teks-teks yang dikaitkan dengan kondisi politik, ekonomi, hukum dan kondisi masyarakat yang disasarkan pada oknum-oknum tertentu dan pemerintah sebagai konteksnya. Konteks-konteks tersebut dibuat sebagai sandaran atas apa yang telah dialami oleh FPI. Mereka merasa bahwa telah terjadi diskriminasi dan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap kelompoknya. Oleh karena itu mereka mencoba melawan pemerintah dengan teks-teks yang diproduksi yang disuarakan melalui media.

Fakta tersebut menjadi pintu masuk bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait bentuk perlawanan FPI terhadap pemerintah melalui teks yang diproduksi dengan menggunakan pisau bedah linguistik dengan pendekatan analisis wacana kritis. Eriyanto (2006:7) mendefinisikan analisa wacana kritis sebagai upaya untuk

menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa ada hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam dimensi linguistik.

Dalam kaitannya dengan media, analisa wacana kritis adalah metodologi dari sudut pandang kritis. Metodologi ini melihat media bukan saluran yang netral, namun media adalah milik kelompok tertentu yang digunakan untuk mendominasi kelompok non dominan (Eriyanto, 2001). Norman Fairclough berpendapat bahwa dalam konsep wacana kritis mencoba menggabungkan beberapa tradisi, diantaranya linguistik, interpretatif dan sosiologi. Ia juga menambahkan bahwa adanya model diskursus yang mencakup tiga dimensi dalam analisa wacana yaitu teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Dimensi teks atau yang dikenal istilah mikrostruktural adalah menganalisis teks dari sisi linguistik yang mencakup kosakata, semantik dan sintaksis. Kedua adalah dimensi mesostruktural atau *discourse practice* yaitu dimensi yang menghubungkan proses produksi dan konsumsi teks. Adapun dimensi yang ketiga adalah makrostruktural atau *sociocultural practice* yang menghubungkan konteks di luar teks (Eriyanto, 2003).

Ketiga dimensi tersebut lalu dianalisis dengan tahap-tahap yang berbeda, yaitu deskripsi, interpretasi dan eksplanasi. Tahap deskripsi adalah suatu tahapan yang digunakan untuk menganalisis teks berdasarkan kohesi dan koherensi, tata bahasa dan diksi. Tahap interpretasi digunakan untuk menganalisis interpretasi teks yang mencakup produksi, penyebaran dan konsumsi teks. Adapun tahap eksplanasi adalah tahapan yang digunakan untuk menganalisis praktik sosiokul-

tural yang meliputi level situasional, institusional, dan sosial (Fairclough, 1995). Oleh karena itu, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan bagaimana bentuk perlawanan FPI terhadap pemerintah melalui teks dan konteks yang diproduksi.

KAJIAN PUSTAKA

Studi-studi terdahulu tentang FPI mengarah pada pembahasan yang integratif dan kontekstual yang mengarah pada tiga pokok bahasan, 1) genealogi gerakan FPI, 2) praksis kekerasan, dan 3) bahasa dan media. Ketiga pokok bahasan ini dijelaskan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensional. Artinya tidak ada perspektif tunggal yang dipergunakan dalam menganalisis FPI. Masing-masing studi mengkaitkan penjelasannya dengan variabel yang dapat menjelaskan FPI dengan lebih komprehensif.

Studi praksis kekerasan FPI sering kali menjadi fokus yang juga banyak dilakukan seperti Woodward (2014), Zinira (2015), dan Facal (2019). Aksi penutupan tempat hiburan malam, penyerangan gereja Kristen Pantekosta, penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah, dan aksi pembubaran diskusi di kampus yang dianggap mengkampanyekan liberalisme dan komunisme menjadi beberapa tanda (*sign*) kekerasan yang diteliti FPI. Aksi-aksi ini dikaitkan dengan kepemimpinan pada waktu itu. Woodward (2014), Anwar (2014) Zinira (2015), Facal (2019) hingga; Herawati, (2020) melihat bahwa aksi FPI yang mengarah pada kekerasan tidak lepas dari kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudoyono yang cenderung membiarkan kelompok Islam Kanan berkembang di Indonesia. Bahkan untuk kelompok-kelompok yang dengan jelas bermaksud



untuk mengganti ideologi negara, pemerintah terlihat diam sehingga kelompok-kelompok tersebut bebas berkembang pada periode 2004-2014. Pada periode tertentu, pemerintah “bersahabat” dengan mereka (Facal, 2019).

Penelitian ini juga memberikan tafsir atas “diamnya” institusi pemerintah dan kepolisian tersebut karena dianggap takut tidak Islami (*un-Islami*) (Woodward dkk, 2014). Bahkan persepsi umum yang muncul cenderung menempatkan aksi FPI tersebut sebagai usaha untuk membantu pemerintah (Woodward, 2014; Anwar, 2014; Zinira, 2015; Facal, 2019; Herawati, 2020). Dalam hal ini, FPI diposisikan melakukan “kerja-kerja” untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah penyakit sosial di masyarakat.

Dengan situasi seperti itu, FPI leluasa melakukan tindakan yang mereka maknai sebagai bagian dari *amar makruf nahi munkar* tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah. Secara tidak langsung pembiaran ini menjadikan pemerintah tidak sebagai lawan. Tidak mengherankan jika diskursus yang diproduksi lebih menyorot kelompok yang tidak sepakat dengan FPI dan dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Studi yang menggunakan perspektif bahasa dan media mengarah pada analisis berita FPI dengan menggunakan perpektif linguistik. Dengan ini yang menjadi subjek penelitian adalah teks-teks yang dimuat di media baik media konvensional dan media baru.

Kusuma (2014) dengan menjadikan berita kekerasan yang dilakukan oleh FPI yang dimuat di Solopos. Dalam kajiannya Kusuma mengidentifikasi bentuk framing dalam perspektif konstruksionis atas kekerasan yang dilakukan FPI terhadap sejumlah warga Gandekan Surakarta. Studi yang sama dapat ditemukan pada

Oktavian (2019) dengan fokus kekerasan yang berbeda, namun menggunakan analisa yang sama.

Pada studi ini juga muncul kajian yang mengarah pada analisis sosial kebahasaan yang menjadikan konsep sosial sebagai alat untuk menafsirkan fakta bahasa yang diproduksi oleh FPI seperti yang dilakukan oleh Anwar (2014). Dia menemukan diskursus sosial yang berkembang dikalangan para aktivis Islam yang mendirikan FPI sebagai bentuk pemahaman atas kondisi sosial-politik yang berkembang pasca reformasi 1998. *Pertama*, adanya rezim penguasa telah bertindak lalim dan bertentangan dengan HAM sehingga memunculkan penderitaan panjang umat Islam Indonesia. *Kedua*, Islam mewajibkan setiap Muslim untuk menegakkan dan mempertahankan harkat dan martabat agama Islam serta umatnya. Ketiga, Muslim berkewajiban untuk dapat mempraktikkan konsep *amr ma'rûf nahi munkar*.

Tujuan untuk menegakkan *amr ma'rûf nahi munkar* menjadi konsep yang digaungkan oleh FPI. Mereka tidak saja melakukan pengajian, namun juga melakukan aksi di jalanan untuk menegakkan ajaran Islam di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, selain agama. Menurut Anwar (2014) setidaknya ada empat wacana *nahy* dan *munkar* yang berkembang di FPI. Wacana tersebut diantaranya; 1) Wacana perlawanan atas penyakit sosial masyarakat seperti premanisme, minuman keras, perjudian, pelacuran, narkoba, pornografi, dan pornoaksi. 2) Wacana perlawanan terhadap masyarakat yang melakukan penyimpangan agama seperti pelecehan agama, perdukunan, penyimpangan aqidah, pemurtadan, sekularisme, pluralisme, tidak pro pada agama dan umat Islam, dan menolak penerapan *shari'ah*. 3) Wacana



perlawanan atas praktik ketidakadilan dan kezaliman, seperti penculikan aktivis FPI dan fitnah. 4) Wacana perlawanan terhadap pemikiran atau paham yang dianggap tidak Islami seperti *nation state* (negara bangsa) dan ekonomi sosialis/kapitalis. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut relevan dengan penelitian ini yaitu terkait FPI, namun belum ada yang membahas konteks FPI yang dikaitkan dengan ilmu kebahasaan khususnya dengan menggunakan pisau bedah analisa wacana kritis seperti pada penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data untuk dianalisis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata untuk diamati (Moleong, 2018).

Data penelitian berupa ujaran-ujaran yang diproduksi oleh elite eks FPI di media berbasis internet. Ujaran-ujaran ini dapat ditemukan dalam bentuk kutipan

langsung ataupun tidak langsung para elite eks FPI dalam sebuah berita di media online. Data yang diambil dibatasi pada ujaran yang dibuat mulai tahun 2014 hingga sekarang. Pemilihan waktu ini dikarenakan pada tahun 2014 menjadi awal FPI secara langsung berhadapan dengan pemerintah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan teknik catat. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang terkait dengan teori dan objek penelitian, kemudian mengklasifikasikan dan mencatat data-data yang terkait dengan pokok masalah penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan melalui tiga tahap, yakni pereduksian data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

ANALISIS DAN HASIL

Penelitian ini mendasarkan tujuh data teks yang diproduksi oleh mantan anggota Front Pembela Islam. Data-data tersebut adalah sebagai berikut.

Penutur	Sumber	Data	Teks
Habib Rizieq Shihab	Tempo.com	1	"Ya Allah sejak kapan penegakan hukum negara atas dasar selera sukasuka. Jika itu dasarnya untuk apa ada pengadilan ya Allah," "Ya Allah para pengkritik pemerintah banyak di penjara, kenapa hukum tajam kepada para pengkritik penguasa," "Bercanda saja tidak boleh berbohong, Apalagi mengurus umat bangsa dan negara. Jadi sekali lagi jangan bohong. Sekali lagi jangan bohong."
	Detik.com	2	siap tenggelamkan partai-partai pendukung penista agama? siap tenggelamkan mereka? siap tinggalkan mereka? siap tenggelamkan mereka? takbir.
Munarman	Harianjogja.com	3	"Kita tahu, para pejabat publik yang diberi amanah untuk menjejahterakan rakyat, justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku mega korupsi lainnya.
	jpnn.com	4	Alam pikiran rakyat sedang dikendalikan penguasa yang memiliki sumber daya untuk melakukan permainan <i>mind control</i> ."
	Republika.co.id	5	"Kalau ada fitnah bahwa FPI dan saya baru-baru ini saja menegam terorisme dan pemboman, maka orang tersebut kudet alias kurang update atau bahkan memang penjahat yang sengaja menyesatkan informasi."
Novel Bamukmin	Sindonews.com	6	"Ina lillahi wa ina ilaihi rojiun telah mati keadilan yang selalu terulang dalam kasus kasus yang berkenaan terhadap kelompok kontra rezim saat ini"
Aziz Yanuar	Detik.com	7	"Kami mengultimatum kepada tangan-tangan jahat untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan yang melawan, merampas, dan memperkosa hak-hak konstitusional anak bangsa, dan kami menyerukan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu menjaga keutuhan dan kedamaian NKRI,



A. Dimensi Mikrostruktural

Berdasarkan elemen kebahasaan yang digunakan oleh seseorang dalam menyampaikan pesan adalah tidak lepas dari kosakata; diksi (pilihan kata formal dan non formal), ungkapan eufimistik dan gramatika; tata bahasa, fungsi sintaksis dan bentuk pemberitaan. Pada data (1) kalimat pertama terdapat penggunaan kata *suka-suka* yang mempunyai makna seenaknya sendiri tidak berdasarkan hukum. Kata tersebut termasuk dalam pilihan kata non formal. Adapun pada kalimat kedua menggunakan kata *tajam* yang bermakna condong. Penggunaan kata-kata tersebut cukup halus namun bermakna sindiran yang dikemas dalam doa. Dilihat dari bentuknya, kalimat tersebut terkategori kalimat tanya, yaitu dengan penanda kata tanya, apa dan kenapa.

Penggunaan diksi pada kalimat selanjutnya yaitu *apalagi* berfungsi sebagai penegas pada bagian kalimat sebelumnya, yang kemudian diikuti oleh pengulangan frase *sekali lagi jangan bohong*. Pengulangan tersebut bermakna ada penegasan terhadap apa yang disampaikan. Secara gramatika tuturan yang disampaikan oleh Habib Rizieq pada data (1) kurang lengkap, yaitu dengan menyembunyikan partisipan atau pelaku. Namun, secara makna jelas yaitu adanya sindiran pada pemerintah agar ada keterbukaan dalam menjalankan amanah.

Pengulangan frase tidak hanya pada data (1) tetapi juga pada data (2) yaitu *siap tenggelamkan*. Frase tersebut terdapat pada bentuk kalimat tanya yang ditandai dengan tanda tanya. Pertanyaan tersebut dilontarkan Habib Rizieq terhadap pendukungnya untuk tidak memilih partai yang anggotanya telah menistakan agama Islam. Verba *tenggelamkan* bermakna seolah-olah partai yang dimaksud harus

benar-benar hilang dari NKRI. Penggunaan verba tersebut sangat ditekankan oleh penutur sehingga mempunyai makna yang kuat dalam kalimat.

Pada kalimat pertama data (3) terdapat penggunaan diksi *mandeg* dan *mangkrak* yang dikaitkan pada kasus korupsi. Selain dua kata tersebut, juga terdapat kata *meng-gila*, dengan kata dasar kata sifat *gila*, yang berarti semakin banyak dan di luar kontrol. Kata-kata tersebut termasuk dalam non formal. Penggunaan kata tersebut dikaitkan dengan kasus korupsi yang semakin banyak dan tidak tertangani dengan cepat dan tepat karena ada kaitan antara pelaku korupsi dan pejabat publik yang saling menguntungkan atau saling melindungi, menurut ormas FPI. Kalimat tersebut kemudian dilanjutkan pada kalimat kedua yang menilai dan menyindir pejabat publik dalam menangani korupsi. Pada kalimat kedua, terdapat kata *justru*, yang secara sintaksis penghubung tersebut berfungsi menghubungkan dua kalimat yang maknanya saling bertentangan, yaitu kalimat kalimat pertama dan kalimat kedua.

Penggunaan frase lain yang menjadi *center* pemberitaan juga terdapat pada data (4) yaitu *mind control*. Frase tersebut bermakna mengendalikan pikiran. Di mana dalam kalimat tersebut, pemerintah mencoba mengendalikan pikiran rakyat agar kasus penangkapan Munarman tidak berbuntut masalah. Kalimat tersebut berhubungan dengan kalimat ketiga dalam data (4) yaitu adanya penggunaan kata *propaganda* dan *advertising*. *Propaganda* adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat agar sejalan atau tidak bersifat kritis. Adapun makna *advertising* adalah disebarluaskan. Dua kata tersebut digunakan oleh Munarman dalam memberikan pendapat terkait kasus Penangkapan dirinya.



Sehingga dua kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah berupaya untuk menggiring opini masyarakat agar tidak kritis terhadap kasus penangkapan dirinya oleh pemerintah.

Penggunaan diksi yang berbentuk akronim juga digunakan oleh mantan sekretaris FPI, Munarman untuk menyuarakan pendapatnya terkait kasus yang menyimpannya. Ia menggunakan kata *kudet* pada data (5) yang bermakna *kurang up date* yang ditujukan pada orang-orang atau oknum yang menganggap dirinya terlibat dalam kasus terorisme dan pengeboman. Orang tersebut dianggap menyebarkan informasi karena dianggap tidak meng-*update* informasi. Secara sintaksis, kalimat yang diproduksi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dalam kalimat majemuk, kata *kalau* atau *jika* tidak boleh digunakan secara bersamaan dengan kata *maka* dalam satu konstruksi satu kalimat. Kata penghubung *kalau* digunakan untuk kalimat yang anak kalimatnya menyatakan syarat terlaksananya apa yang dinyatakan dalam induk kalimat. Adapun penghubung *maka* difungsikan pada kalimat majemuk yang anak kalimatnya menyatakan akibat dari yang dinyatakan dalam induk kalimat.

Tuturan pragmatis lain yang diproduksi oleh eks petinggi FPI adalah pada data (6) yaitu "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Secara implisit ungkapan ini menunjukkan rasa duka dan penyerahan diri seorang hamba terhadap kehendak Tuhan. Kalimat tersebut merupakan bentuk pernyataan rasa kehilangan terhadap keadilan yang dianggap telah mati dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan kelompok yang menentang rezim saat ini. Secara gramatika dan tata bahasa, kalimat ini memenuhi kaidah bahasa formal.

Statement lain yang menunjukkan eufimisme adalah ada pada data (7) yaitu penggunaan kata 1.000%. kata 1000% sebenarnya tidak lazim digunakan dalam hitungan prosentasi, namun karena begitu yakinnya pengacara FPI, Aziz Yanuar terhadap apa yang dilakukan pemerintah yang dianggap telah dzalim, deskriminatif, memfitnah, merekayasa bahkan melanggar HAM pada ormas FPI dan anggotanya. Kemudian ia meneruskan pada kalimat kedua yang berupa kalimat perintah dengan menggunakan kata *ultimatum*. Makna dari kata ultimatum adalah tuntutan yang harus dipenuhi. Dalam kalimat kedua tersebut juga terdapat penggunaan frase *tangan jahat*, yang ditujukan bagi orang atau pihak yang telah melakukan kejahatan. Konteks dalam kalimat tersebut adalah pengacara FPI meminta agar pihak-pihak yang telah melakukan perampasan hak konstitusional anak bangsa berhenti dan meminta masyarakat untuk bersatu menjaga keutuhan NKRI. Secara sintaksis, dalam kalimat kedua tersebut terdapat dua klausa yang dihubungkan dengan kata *dan* sebagai konjungsi dalam kalimat.

B. Dimensi Mesostruktural

Dimensi mesostruktural ini mengkaji proses penyebaran teks, produksi teks dan konsumsi teks. Interpretasi di media mesostruktural ini dilakukan pada penutur teks, profil penutur dan cara penutur dalam memproduksi teks. Penutur yang dibahas dalam dimensi ini adalah para petinggi FPI yang meliputi Habib Rizieq Shihab, Munarman, Novel Bamukmin, dan Aziz Yanuar. Bagaimana profil dan cara mereka memproduksi teks diuraikan dalam dimensi ini tentunya dengan melibatkan latar belakang para penuturnya.



B.1 Habib Rizieq Shihab

Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab atau yang dikenal dengan nama Habib Rizieq Shihab adalah pendiri organisasi Islam dengan nama Front Pembela Islam. Organisasi ini memiliki kelompok Sayap Juang dan Laskar Pembela Islam. Kelompok ini dianggap kontroversial karena melakukan razia terhadap kemaksiatan terutama pada bulan Romadhon akan tetapi organisasi ini tidak bertahan lama karena ditutup pemerintah pada Desember 2020.

Habib Rizieq sebagai ketua umum FPI sering mendapat sorotan media karena beberapa kasus yang ia hadapi yaitu karena pernyataan yang kontroversi terutama pada waktu orasi di acara 212. Isi pidato Habib Rizieq penuh dengan perlawanan kepada pemerintah dikemas dalam pidato yang berisi kritikan dan sindiran terhadap pemerintah. Bentuk perlawanan tampak pada pemilihan diksi yang dipilih oleh Habib Rizieq untuk menyusun teks yang ditujukan pada pemerintah khususnya instansi hukum dan oknum-oknum tertentu.

B.2 Munarman

Munarman, SH adalah mantan sekretaris umum FPI. Ia memulai karirnya dengan bergabung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum sebagai sukarelawan tahun 1995. Tidak jauh dengan ketua umumnya yaitu Habib Rizieq Shihab yang sering terlibat masalah hukum, Munarman juga sama. Ia pernah di tahan di Polsekro Limo Depok karena beberapa kasus yang ia hadapi. Kasus selanjutnya, polisi menetapkan ia sebagai tersangka dan diputuskan dipenjara setelah melihat bukti video ia menghadiri pembaiatan kelompok terduga teroris di Makasar. Sebagai seorang aktifis, Munarman tidak

tinggal diam. Dia berupaya membela diri, beropini melalui kuasa hukumnya. Selain itu, dia juga mengeluarkan statmen-statmen ke berbagai media yang bernada kritikan maupun sindiran terkait apa yang dilakukan petinggi pemerintah terhadap organisasinya yaitu FPI, terutama terhadap kasus yang menyimpannya dan tragedi terbunuhnya laskar FPI yang diduga dilakukan oleh polisi.

B.3 Novel Bamukmin

Novel Bamukmin adalah salah satu tokoh Front Pembela Islam dan Koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212. Dia juga salah satu saksi dari kasus pengadilan Ahok. Sebagai bagian dari eks anggota FPI, Dia juga vocal terhadap setiap kegiatan FPI dengan menyuarakan tuntutan pembebasan Habib Rizieq, usut tuntas penembakan enam anggota laskar FPI, dan bebaskan para ulama yang baru-baru ini ditangkap.

B.4 Aziz Yanuar

Aziz Yanuar adalah advokat yang mengabdikan diri pada Bantuan Hukum FPI pada tahun 2016, GNPf Ulama tahun 2016 serta Persaudaraan Alumni 212. Nama Aziz Yanuar mulai mencuat setelah dia masuk menjadi bagian FPI. Dia masuk FPI mulai tahun 2012 dengan tujuan ingin berkontribusi terhadap *amar makruf nahi munkar*. Dengan suksesnya kegiatan *sweeping* yang dilakukan DPC FPI Pondok Gede membuat Aziz mendapatkan amanah untuk menjadi Wakil Sekretaris Umum bidang organisasi DPP FPI. Banyak ilmu yang dia dapatkan ketika masuk FPI terutama bimbingan dari senior-seniornya terutama Munarman. Munarman tidak hanya dianggap sebagai senior, tetapi juga guru bagi Aziz. Oleh karena itu, ketika Munarman terjerat kasus hukum, Aziz



sebagai juniornya pasang badan sebagai pengacara untuk membela bahkan membebaskan Munarman. Banyak pernyataan-pernyataan Aziz yang diekspose media yang menyatakan pembelaannya terhadap Munarman dan kasus-kasus yang menimpa anggota FPI.

C. Dimensi Makrostruktural

Makrostruktural atau yang disebut sebagai *sociocultural practice* adalah dimensi ketiga dari konsep Fairclough yang menghubungkan konteks di luar teks. Praktik sosial budaya ini menganalisis teks berdasarkan tingkat situasional, institusional dan sosial yang didasarkan pada opini konteks di luar teks yang berefek pada bagaimana sebuah wacana yang berada dalam teks yang diproduksi oleh penutur.

Praktik sosial yang pertama yaitu tingkat situasional. Terdapat tiga konteks situasional dalam teks perlawanan FPI terhadap pemerintah, yaitu pertama adalah kasus reoni 212. Teks-teks yang diproduksi pada moment reoni 212 tampak pada data 1, 2 dan 3. ketiga data tersebut adalah penggalan teks yang disampaikan pada reoni 212. Kasus kedua adalah kasus terkait penangkapan mantan sekretaris umum yaitu Munarman. Data yang terkait kasus tersebut adalah data 4 dan 5. Data tersebut diproduksi sendiri oleh Munarman terkait kasus yang menimpanya. Adapun kasus ketiga adalah terkait tewasnya anggota FPI di KM 50. Kasus yang tidak terungkap keadilannya tersebut membuat anggota FPI memproduksi teks yang disampaikan di media, seperti pada data 6 dan 7.

Praktik sosial yang kedua adalah institusional. Praktik sosial ini berkaitan dengan pengaruh beberapa institusi yang terdapat di negara Indonesia. Pada data 1, 6 dan 7 merujuk pada institusi hukum.

Adapun data 2 teks yang diproduksi ditujukan pada partai politik atau badan pemerintah yang menangani pemilihan umum. Adapun data 3 secara teras terang ditujukan pada instansi komisi pemberantasan korupsi. Adapun data 4, 5 dan 6 ditujukan pada pihak kepolisian.

Adapun, praktik sosial yang ketiga adalah berkaitan dengan sosial budaya di mana praktik ini tidak lepas dari situasi makro. *Booming* dan pentingnya teks-teks yang diproduksi oleh (Habib Rizieq Shihab, Munarman, Novel Bamukmin, Aziz Yanuar dan Bahctiar Nasir) erat kaitannya dengan eksistensi para mantan pejabat FPI dalam menyuarakan keadilan di berbagai media.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait teks dan konteks diskursus perlawanan FPI terhadap pemerintah melalui pendekatan Norman Fairclough melalui tiga dimensi dapat disimpulkan bahwa secara tekstual ketujuh teks yang diproduksi menitikberatkan pada penggunaan diksi yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam mengkritik pemerintah. Kritik tersebut difokuskan pada tiga kasus yang berbeda. Hal itu dapat dilihat dari teks yang diproduksi Habib Rizieq memfokuskan pada kasus reoni 121 yang ditujukan pada instutusi pemerintah yakni pengadilan dan partai politik. Fokus kritik kedua ditujukan untuk institusi hukum yaitu pengadilan dan KPK. Hal ini disampaikan oleh Munarman dan Aziz Yanuar terkait kasus atas penangkapan Munarman yang dituduh terlibat kasus terorisme. Fokus ketiga yaitu terkait dengan pembunuhan laskar FPI di KM 50, di mana kritik itu disampaikan oleh Novel Bamukmin untuk instistusi Polri dan Hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2014). *Pemikiran dan Gerakan amr ma'rūf, nahy munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1998-2012*. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 4 (1)
- Al-Zastrouw, N. (2006). *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS.
- Daniels, T. (2007). *Liberals, Moderates and Jihadists: Protesting the Danish Cartoons in Indonesia*. Contemporary Islam (1), 231–246.
- Detik.com "Pidato Lengkap Habib Rizieq di Reuni Akbar Mujahid 212" . <https://news.detik.com/berita/d-4326969/pidato-lengkap-habib-rizieq-di-reuni-akbar-mujahid-212>. Diakses pada 22 Maret 2023
- Detik.com "Pihak Munarman soal Ketua JoMan Dicapot dari Komut: Bukti Hukum Ditunggangi" <https://news.detik.com/berita/d-5999179/pihak-munarman-soal-ketua-joman-dicapot-dari-komut-bukti-hukum-ditunggangi>. Diakses pada 23 Maret 2023
- Evans, P. (1996). *The Verbally Abusive Relationship, Expanded Third Edition: How to Recognize It and How to Respond*. Holbrook, Mass:Adams Media Corporation.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Facal, G. (2019). *Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia*; TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 8(1), 7 - 20,
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. New York: Pantheon
- Gertz, C. (1983). *Santri Priyayi dan Abanga*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Harianjogja.com. "PA 212 Bakal Turun ke Jalan Lagi, Soal Apa?" <https://news.harianjogja.com/read/2020/02/04/500/1030999/pa-212-bakal-turun-ke-jalan-lagi-soal-apa>. Diakses pada 23 Maret 2023
- Norman, F. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited.
- Herawati, F. (2020). *A Critique of the Discourse "Defending Islam" by The Islamic Defender Front (FPI, Front Pembela Islam) as Violence Legitimation in The Name of Islam*
- Jenkins, H. (2004). *The Cultural Logic of Media Convergence*. International Journal of Cultural Studies, 7(1), 33–43,
- Jamhari & Jahroni, J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jpnn.com "Pernyataan Terbaru Munarman Eks FPI, Menyebut Kerajaan Majapahit". <https://www.jpnn.com/news/pernyataan-terbaru-munarman-eks-fpi-menyebut-kerajaan-majapahit>. Diakses pada 23 Maret 2023
- Mills, S. (1997). *Discourse*. London: Routledge
- Miles, M. B. & Huberman. A.M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, J. Lexi. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Scott, J.C. (1985). *Weapon of The Weaks: Everyday Form of Peasant Resistance*. Yale University Press
- Sindonews.com "Habib Rizieq Selalu Kontra Pemerintah, Pengamat: Dia Jalankan Fungsi Oposisi" <https://nasional.sindonews.com/read/230620/12/habib-rizieq-salelalu>



kontra-pemerintah-pengamat-dia-
jalankan-fungsi-oposisi. Diakses pada
20 Maret 2023

Sindonews.com "2 Polisi Penembak
Anggota FPI Divonis Bebas, PA 212
Desak Munarman Juga Dibebaskan"
[https://metro.sindonews.com/read/
717377/170/2-polisi-penembak-
anggota-fpi-divonis-bebas-pa-212-
desak-munarman-juga-dibebaskan-
1647659017](https://metro.sindonews.com/read/717377/170/2-polisi-penembak-anggota-fpi-divonis-bebas-pa-212-desak-munarman-juga-dibebaskan-1647659017). Diakses pada 23 Maret
2023

Tempo.co "Isi Pidato Rizieq Shihab di
Acara Munajat 212".[https://
nasional.tempo.co/read/1178261/
isi-pidato-rizieq-shihab-di-acara-
munajat-21](https://nasional.tempo.co/read/1178261/isi-pidato-rizieq-shihab-di-acara-munajat-21). Diakses pada 22 Maret
2023

Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah,
I., Murtaugh, D., Chris, C., Lundry,
& Amin, A. (2014). *The Islamic De-
fenders Front: Demonization, Violence
and the State in Indonesia*. *Contempo-
rary Islam*, 8, 153–171

